



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007
TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan dalam Peraturan Presiden tersebut perlu diperjelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2A

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada."

3. Lampiran I mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
4. Lampiran II Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan diubah, sehingga seluruh Lampiran II tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 111 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Perjudian/Kasino	92429	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dsb)	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Museum Pemerintah	92321	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pemukiman/Lingkungan Adat	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Monumen	92324	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Objek Ziarah (tempat, peribadatan, pertilasan, makam, dsb)	92439	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam	01501	Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
8	Penangkapan Spesies Ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES	05011	Kelautan dan Perikanan
9	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	64223	Komunikasi dan Informatika
10	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi	92131	Komunikasi dan Informatika

11 Penyediaan ...

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
11	Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat	63310	Perhubungan
12	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang	63390	Perhubungan
13	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
14	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
15	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	63321	Perhubungan
16	Vessel Traffic Information System (VTIS)	62321	Perhubungan
17	Pemanduan Lalu Lintas Udara	63330	Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
18	Industri Bahan Kimia yang dapat Merusak Lingkungan, seperti : Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya	24212	Perindustrian
19	Industri Bahan Kimia Skedul-I Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll)	24119	Perindustrian
20	Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan minuman mengandung Malt)	15510	Perindustrian
21	Industri Pembuat Chlor Alkali dengan bahan mengandung Merkuri	24111	Perindustrian
22	Industri Siklamat dan Sakarin	24119	Perindustrian
23	Budidaya Ganja	01119	Pertanian

Catatan: ...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 111 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan

a. Dicadangkan untuk UMKMK

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil (s/ d 10 MW)	40101	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Agen Perjalanan Wisata	63420	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Sanggar Seni	92142	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Usaha Jasa Pramuwisata	63430	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Pengusahaan Hutan Tanaman lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll)	02039	Kehutanan
6	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	02052	Kehutanan
7	Industri Kayu Gergajian (Kapasitas Produksi sampai dengan 2000M ³ /Tahun)	20101	Kehutanan
8	Industri Primer Pengolahan Rotan	20104	Kehutanan
9	Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau:		Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Kerajinan Ukir-ukiran kecuali Mebeller Industri Alat-alat Dapur Industri Barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	20293 20294 20299	

10 Industri ...

10	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri)	02059	Kehutanan
11	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	01501	Kehutanan
12	Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 GT, di wilayah perairan sampai dengan 12 mil atau kurang.	05011	Kelautan dan Perikanan
13	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	05031	Kelautan dan Perikanan
14	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan	15129	Kelautan dan Perikanan
15	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	92132	Komunikasi dan Informatika
16	Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan (Golongan Kecil): Kirim Mengirim Barang Cetak	64130	Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Surat Kabar Bungkusan Kecil Paket Pengiriman Uang		
17	Jasa Telekomunikasi meliputi: Warung Telekomunikasi Warung Internet Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	64314 64325 64319	Komunikasi dan Informatika
18	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) Golongan Kecil: Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	45100	Pekerjaan Umum

	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	45100	Pekerjaan ...
	Pekerjaan Perancah dan Bekisting	45243	
	Pekerjaan Pembongkaran	45100	
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gedung Bertingkat lebih dari dua lantai	45211	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik	45213	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial	45214	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	45218	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya	45217	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	45216	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	45215	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang	45221/ 45222	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	45221/ 45223	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan dan Bangunan Air lainnya	45224	
	Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	45328	

	Pekerjaan Konstruksi untuk jaringan pipa dan kabel distribusi, dan jaringan pelayanan	45328	Pekerjaan ...
	Pekerjaan Konstruksi untuk sarana Olah Raga dan Rekreasi	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	45218	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi lainnya (seperti kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf)	45218	
	Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan rekayasa lainnya	45229	
	Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	45245	
	Pekerjaan Pondasi termasuk Pemancangan Tiang Pancang	45241	
	Pekerjaan Pembesian	45221	
	Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas	45314	
	Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Sistim Alarm Pencurian	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	45316	
	Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan Operator	45500	
	Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000	
	Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk satu atau dua lantai Bangunan Bertingkat	45211	
	Pembuatan Sumur Air	45242	
	Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran:		
	Pekerjaan Beton	00000	
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	00000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
----	--------------	------	--------

Pekerjaan ...

	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya:		Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara	45317	
	Pekerjaan Plumbing (Pekerja Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)	45311	
	Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting Listrik	45312	
	Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan	45313	
	Pekerjaan Konstruksi Listrik lainnya	45311	
	Pekerjaan Isolasi (Kabel Listrik, Air, Pemanas, Suara)	45315	
	Pekerjaan Konstruksi Pagar	45316	
	Pekerjaan Instalasi lainnya	45319	
	Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	45319	
	Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	45401	
	Pekerjaan Plesteran	45403	
	Pekerjaan Pengecatan	45403	
	Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai	45402	
	Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya	45402	
	Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam	00000	
	Pekerjaan Dekorasi Interior	00000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Pekerjaan Ornamen Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya	00000 45409	
19	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Kecil: Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur Jasa Desain Arsitektur	74210 74210	Pekerjaan umum

	Jasa Administrasi Kontrak Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak Jasa Arsitektur lainnya Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya Jasa Rekayasa lainnya	74210 74210 74210 74210 74210 74210 74210	Jasa ...
	Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	74210 74210	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	74210	
	Jasa Perencanaan Kota	74210	
	Jasa Arsitektur Pertamanan	74210	
	Komposisi dan Kemurnian	74210	
	Jasa Pengujian dan Analisa	74210	
	Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	74210	
	Sistem Inspeksi Teknis	74210	
	Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu lainnya	74210	
	Jasa Arsitektur Pertamanan	74210	
20	Angkutan Orang a. Dalam Trayek - Angkutan Bis/ Pedesaan	60211 60212 60213 60214 60215	Perhubungan

	b. Tidak Dalam Trayek - Angkutan Taksi	60221	b. tindak ...
21	Pelayaran Rakyat	61118	Perhubungan
22	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya	15122 15125	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
23	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakkan tangan	17115	Perindustrian
24	Industri Batik Tulis	17124	Perindustrian
25	Industri Pengasapan Karet	25121	Perindustrian
26	Industri Perkakas Tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	28932 28933 28939	Perindustrian
27	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah.	26321	Perindustrian
28	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah tangga.	93050 93062 93061	Perindustrian
29	Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi: Industri Bordir/Sulaman Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu	17293 20291 20292	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
----	--------------	------	--------

	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali Mebeller	20293	Industri ...
	Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	20294	
	Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	20299	
	Industri Alat-alat Musik Tradisional	36921	
30	Industri Perkakas Tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop.	28931	Perindustrian
31	Gula Merah	15422	Perindustrian
32	Industri Makanan Olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.	15494 15498	Perindustrian
33	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian.	15317	Perindustrian
34	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau.	16001	Perindustrian
35	Budidaya Padi (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01111	Pertanian
37	Budidaya Jagung (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01112	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
38	Budidaya Tanaman Pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha	01112	Pertanian
39	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01221	Pertanian
40	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras serta persilangannya	01223	Pertanian
41	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha:		Pertanian

	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113	Perkebunan ...
	Perkebunan Tembakau	01114	
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115	
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116	
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117	
	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01118	
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119	
	Perkebunan Kelapa	01133	
	Perkebunan Kepala Sawit	01134	
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135	
	Perkebunan Jambu Mete	01136	
	Perkebunan Lada	01137	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perkebunan Cengkeh Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01138 01139	
42	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26/2007 dan/atau perubahannya: Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit Industri Minyak Atsiri Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	15141 15143 15144 24294 15313 15314	Pertanian

Industri ...

	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao Industri Kopra	15315 15318	
43	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya Perkebunan Tembakau	01113 01114	Pertanian
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116	
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117	
	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01118	
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119	
	Perkebunan Kelapa	01133	
	Perkebunan Kelapa Sawit	01134	
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135	
	Perkebunan Jambu Mete	01136	
	Perkebunan Lada	01137	
	Perkebunan Cengkeh	01138	
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139	

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

b. Kemitraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

b. Kemitraan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera (Persuteraan Alam)	02034	Kehutanan
2	Pengusahaan Perlebahan	02039	Kehutanan
3	Pengusahaan Rotan	02031	Kehutanan
4	Pengusahaan Bambu	02039	Kehutanan
5	Pengusahaan Gaharu	02039	Kehutanan
6	Pengusahaan Seedlak	02039	Kehutanan
7	Pengusahaan Tanaman Pangan Alternatif (Sagu)	02039	Kehutanan
8	Pengusahaan Getah Pinus	02032	Kehutanan
9	Pengusahaan Damar	02035	Kehutanan
10	Pengusahaan Getah-getahan	02039	Kehutanan
11	Pengusahaan Minyak Atsiri	02039	Kehutanan
12	Pembesaran Ikan Laut	05021	Kelautan dan Perikanan
13	Pembenihan Ikan Laut	05022	Kelautan dan Perikanan
14	Pembesaran Ikan Air Tawar	05041	Kelautan dan Perikanan
15	Pembesaran Ikan Air Payau	05042	Kelautan dan Perikanan
16	Pembenihan Ikan Air Payau	05044	Kelautan dan Perikanan
17	Pembenihan Ikan Air Tawar	05043	Kelautan dan Perikanan
18	Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI)		Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya	15122	
	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya	15125	
19	Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan		Kelautan dan Perikanan

	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	51213	Perdagangan ...
	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	53213	
20	Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon: Pusat layanan informasi (call centre)	64319	Komunikasi dan Informatika
	Layanan content (ring tone, sms premium, dsb)	64311	
	Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya	64319	
21	Penyelenggaraan Jasa Multimedia: Akses internet (ISP)	64314	Komunikasi dan Informatika
22	Industri Rokok: Industri Rokok Kretek Industri Rokok Putih Industri Rokok lainnya	16002 16003 16004	Perindustrian
23	Industri pemanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran	15132	Perindustrian
24	Industri Makanan Olahan dari Biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra: Industri Kopra	15318	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Kecap Industri Makanan dari kedele dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya	15493 15495 15496	
25	Industri Batik Cap	17124	Perindustrian
26	Industri Pengolahan Rotan Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya	20104 20103	Perindustrian
27	Industri Barang Jadi Kayu Bakau: Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220	Perindustrian

Industri ...

	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller Industri Alat-alat Dapur	20293 20294	
28	Industri Minyak Atsiri	24294	Perindustrian
29	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen: Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik Industri Barang lainnya dari Tanah Liat/Keramik Industri Kapur Industri Barang-barang dari Semen Industri Barang-barang dari Kapur	 26322 26329 26412 26421 26422	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya	26429	
30	Industri Perhiasan dari Perak:		Perindustrian
	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	36912	
	Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	36913	
31	Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan termasuk peralatan dan perlengkapannya	35111	Perindustrian
		35112	
32	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan	29211	Perindustrian
33	Industri Kerajinan lainnya:		Perindustrian
	Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia	36915	
	Industri Permata	36911	

Industri ...

	Industri Kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	36993	
	Industri Pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	36999	Perindustrian
	Daur Ulang Barang-barang bukan Logam	37200	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
34	Industri paku mur dan baut, industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak.	28993 29113 29120 35912 35922	Perindustrian
35	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	15201	Perindustrian
36	Kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan di kawasan transmigrasi	013 014 050	Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

c. Kepemilikan ...

c. Kepemilikan Modal

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
1	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service)	11200	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Jasa Engineering Procurement Construction (EPC)	74140	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pembangkit Tenaga Listrik	40101	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Transmisi Tenaga Listrik	40102	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
				Mineral
7	Konsultasi Ketenagalistrikan	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan	45312	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Pemeliharaan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik	4010	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Distribusi Tenaga Listrik	40103	Maksimal 95%	Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	40101	Maksimal 95%	12 Pembangkit ... Energi dan Sumber Daya Mineral
13	Galeri Seni	70101	Maksimal 50%	Kebudayaan dan Pariwisata
14	Gedung Pertunjukan Seni	70101	Maksimal 50%	Kebudayaan dan Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
15	Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan: Wisata Tirta Wisata Petualangan Alam Wisata Gua Wisata Minat Usaha lainnya	92432 92433 92434 92439	Maksimal 25%	Kehutanan
16	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01501 92439	Maksimal 49%	Kehutanan
17	Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	02059 01502	Maksimal 49%	Kehutanan
18	Penangkaran/Budidaya Koral	01502	Maksimal 49%	Kehutanan
19	Usaha Industri Farmasi: Industri Obat Jadi Industri Bahan Baku Obat	24232 24231	Maksimal 75%	Kesehatan
20	Clinic Specialised Medical Sevices (Klinik Kedokteran Spesialis)	85122	Maksimal 65%	Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
----	--------------	------	--	--------

21 Clinic ...				
21	Clinic Specialised Dental Services (Klinik Kedokteran Gigi Spesialis)	85123	Maksimal 65%	Kesehatan
22	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Klinik)	85193	Maksimal 65%	Kesehatan
23	Jasa Rumah Sakit lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	85119	Maksimal 65%	Kesehatan
24	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Klinik Medical Check-up)	85193	Maksimal 65%	Kesehatan
25	Jasa pengetesan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan	74220	Maksimal 49%	Kesehatan
26	Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit)	74140	Maksimal 65%	Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
27	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat)	85193	Maksimal 65%	Kesehatan
28	Jasa Pelayanan Akupunktur	85191	Maksimal 49%	Kesehatan
29	Sewa Guna Usaha (Leasing)	65910	Maksimal 85%	Keuangan

30. Pembiayaan ...

30	Pembiayaan Non- Leasing: Pembiayaan Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Kartu Kredit Pembiayaan Non Leasing lainnya	65921 65922 65923 65929	Maksimal 85%	Keuangan Keuangan
31	Modal Ventura	65930	Maksimal 85%	Keuangan
32	Perusahaan Asuransi Kerugian	66030	Maksimal 80%	Keuangan
33	Perusahaan Asuransi Jiwa	66010	Maksimal 80%	Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
34	Perusahaan Reasuransi	66030	Maksimal 80%	Keuangan
35	Perusahaan Pialang Asuransi	67204	Maksimal 80%	Keuangan
36	Perusahan Pialang Reasuransi	66030	Maksimal 80%	Keuangan
37	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	67202	Maksimal 80%	Keuangan
38	Perusahaan Konsultan Aktuaria	67203	Maksimal 80%	Keuangan
39	Perusahaan Agen Asuransi	67201	Maksimal 80%	Keuangan
40	Bank Devisa	65121	Maksimal 99%	Bank Indonesia
41	Bank Non Devisa	65122	Maksimal 99%	Bank Indonesia
42	Bank Syariah	65123	Maksimal 99%	Bank Indonesia
43	Perusahaan Pialang Pasar Uang	65999	Maksimal 99%	Bank Indonesia

Penyelenggaraan ...

44	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi:			Komunikasi dan Informatika
----	--	--	--	----------------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap: - Lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched - Berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak - Seluler - Satelit	64210 64210 64210 64222 64223	Maksimal 49% Maksimal 49% Maksimal 65% Maksimal 65% Maksimal 65%	
45	Penyelenggaraan Jasa Multimedia: Jasa sistem komunikasi data Jasa interkoneksi internet (NAP) Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	64322 64329 64324	Maksimal 95% Maksimal 65% Maksimal 49%	Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Jasa multimedia lainnya	64329	Maksimal 49%	

46 Pembentukan ...

46	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi(tes laboratorium)	00000	Maksimal 95%	Komunikasi dan Informatika
47	Jasa Konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil: Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk lahan Pertambangan Pekerjaan Perancah dan Bekisting Pekerjaan Pembongkaran untuk bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai	45100 45100 45243 45100/ 45211	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik	45213		
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	45214		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan sarana Hiburan Umum	45208		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya	45217		

	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	45216		Pekerjaan ...
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	45215	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan lainnya	45219		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	45221 / 45222 45221 / 45222 45328		
48	Jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil: Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan Pekerjaan Pembesian Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	00000 45221 45314 45315 45315	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	45316		Pekerjaan ...
	Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	45500		
	Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000		
	Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	00000		
	Pekerjaan Konstruksi untuk satu atau dua lantai bangunan bertingkat	45211	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pembuatan Sumur Air	45242		
	Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	00000		
	Pekerjaan Beton	00000		
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	00000		
	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya:			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara	45317		
	Pekerjaan Plumbing (Pekerjaan Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor	45311		
	Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting listrik	45312		

Pekerjaan ...

	Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan	45313		
	Pekerjaan Konstruksi listrik lainnya	45311		
	Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)	45315		
	Pekerjaan Konstruksi Pagar	45316		
	Pekerjaan Instalasi lainnya	45319		
	Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	45319		
	Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	45401		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Pekerjaan Plesteran Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai	00000 45403 45402		
	Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam Pekerjaan Dekorasi Interior Pekerjaan Ornamen Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya	45402 00000 45404 00000 45409	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum

49 Jasa ...				
49	Jasa Bisnis /Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur Jasa Desain Arsitektur Jasa Administrasi Kontrak	74210 74210 74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	74210		
	Jasa Arsitektur lainnya	74210		
	Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	74210		
	Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	74210		
	Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya	74210		
	Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan lainnya	74210		
	Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	74210		
	Jasa Rekayasa Terpadu dan dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	74210		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
----	--------------	------	--	--------

Jasa ...

	Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	74210		
	Jasa Perencanaan Kota	74210		
	Jasa Arsitektur	74210		
	Pertamanan			
	Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	74210		
	Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	74210		
	Sistem Inspeksi Teknis	74210		
	Jasa Pengujian dan Analisa lainnya	74210		
50	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Arsitektur Pertamanan	74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
51	Pengusahaan Jalan Tol	45221	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum
52	Pengusahaan Air Minum	41001	Maksimal 95%	Pekerjaan Umum
53	Pendidikan Dasar dan Menengah: Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	80121 80122	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional

	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	80123 80221 80222		Sekolah ...
54	Pendidikan Tinggi: Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta Jasa Pendidikan Tinggi Non Gelar Swasta	80321 80322	Maksimal 49% Maksimal 49%	Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional
55	Pendidikan Non - Formal:		Maksimal 49%	Pendidikan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Jasa Pendidikan Komputer Swasta	80921		
	Jasa Pendidikan Bahasa Swasta	80922		
	Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta	80923	Maksimal 49%	Pendidikan Nasional
	Jasa Pendidikan Ketrampilan Swasta lainnya	80929		
56	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha(Direct Selling)	00000	Maksimal 60%	Perdagangan
57	Angkutan Penyeberangan: Angkutan Penyeberangan Antar Negara	61221	Maksimal 49%	Perhubungan

	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	61222		Angkutan ...
	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi	61223		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	61224 61225 61226		
58	Angkutan Sungai dan danau Kapal < 30 GT: Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan atau hewan	61211 61212 61213 61214	Maksimal 49% Maksimal 49%	Perhubungan Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
----	--------------	------	--	--------

	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	61215		Angkutan ...
	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	61216		
59	Sarana ASDP: Jasa Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan danau	63322	Maksimal 49%	Perhubungan
	Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	63323		
60	Angkutan Barang Umum	60231	Maksimal 49%	Perhubungan
61	Angkutan Barang Berbahaya	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
62	Angkutan Barang Khusus	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
63	Angkutan Barang Peti Kemas	60231	Maksimal 49%	Perhubungan
64	Angkutan Barang Alat Berat	60232	Maksimal 49%	Perhubungan
65	Usaha penunjang pada terminal	63310	Maksimal 49%	Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
66	Angkutan Berjadwal Domestik Umum	62111	Maksimal 49%	Perhubungan
67	Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis	62112	Maksimal 49%	Perhubungan
68	Angkutan Berjadwal Internasional	62120	Maksimal 49%	Perhubungan
69	Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Umum	62201	Maksimal 49%	Perhubungan

70	Angkutan Udara tidak Berjadwal Domestik Perintis	62202	Maksimal 49%	70 Angkutan ... Perhubungan
71	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyemprotan dan Penyerbukan	62311	Maksimal 49%	Perhubungan
72	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan, Pemotretan, Survei dan Pemetaan	62312	Maksimal 49%	Perhubungan
73	Angkutan Udara Khusus Olahraga	62313	Maksimal 49%	Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
74	Angkutan Udara Khusus Orang Sakit (Medical Evacuation)	62314	Maksimal 49%	Perhubungan
75	Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	62320	Maksimal 49%	Perhubungan
76	Jasa Kebandar-udaraan	63330	Maksimal 49%	Perhubungan
77	Jasa Pengurusan Transportasi	63540	Maksimal 49%	Perhubungan
78	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	63540	Maksimal 49%	Perhubungan
79	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	63420	Maksimal 49%	Perhubungan
80	Jasa Penunjang Langsung Kegiatan Penerbangan	63330	Maksimal 49%	Perhubungan
81	Angkutan Laut: Domestik: Angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang	61111	Maksimal 49%	Perhubungan

	Angkutan laut domestik umum tramper untuk penumpang	61112		Angkutan ...
--	---	-------	--	--------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Angkutan laut domestik umum liner untuk barang	61113		
	Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang	61114		
	Angkutan laut domestik khusus untuk wisata	61115		
	Angkutan laut domestik khusus untuk barang	61116	Maksimal 49%	Perhubungan
	Angkutan laut domestik perintis	61117		
	Angkutan laut domestik pelayaran rakyat	61118		
	Internasional: Angkutan laut internasional umum liner untuk penumpang	61121		
	Angkutan laut internasional umum tramper untuk penumpang	61122		
	Angkutan laut internasional umum liner untuk barang	61123		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Angkutan laut internasional umum tramper untuk barang	61124		
	Angkutan laut internasional khusus untuk wisata	61125		

	Angkutan laut internasional khusus untuk barang	61126		Angkutan ...
	Angkutan laut internasional pelayaran rakyat	61127		
82	Bongkar Muat/BM	63100	Maksimal 49%	Perhubungan
83	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal RO-RO)	63210 63220 63290	Maksimal 49%	Perhubungan
84	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (reception facilities).	63290	Maksimal 49%	Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
85	Jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah Air (PBA)	00000	Maksimal 49%	Perhubungan
86	Pemeliharaan dan reparasi mobil	93040	Maksimal 49%	Perindustrian
87	Budidaya padi (dengan luas lebih dari 25 Ha)	01111	Maksimal 95%	Pertanian
88	Budidaya jagung (dengan luas lebih dari 25 Ha)	01112	Maksimal 95%	Pertanian
89	Budidaya ubi kayu (dengan luas lebih dari 25Ha)	01112	Maksimal 95%	Pertanian

90	Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung (dengan luas lebih dari 25Ha)	01112	Maksimal 95%	90 Budidaya ... Pertanian
91	Usaha perbenihan/ pembibitan padi dan palawija	01111 01112	Maksimal 95%	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
92	Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya, tanpa unit pengolahan:		Maksimal 95%	Pertanian
	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113		
	Perkebunan Tembakau	01114		
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115		
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116		
	Perkebunan Tanaman Obat/ Bahan Farmasi	01117		
	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01118		
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119		
	Perkebunan Kelapa	01133		
	Perkebunan Kelapa Sawit	01134		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135		Perkebunan ...
	Perkebunan Jambu Mete	01136	Maksimal 95%	Pertanian
	Perkebunan Lada	01137		
	Perkebunan Cengkeh	01138		
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139		
93	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya):		Maksimal 95%	Pertanian
	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	15141		
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	15143		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	15144		
	Industri Minyak Atsiri	24294		
	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	15313		
	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	15314		
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	15315		
	Industri Kopra	15318		

94 Usaha ...

94	Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 dan/ atau perubahannya:		Maksimal 95%	Pertanian
----	--	--	--------------	-----------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	15141	Maksimal 95%	Pertanian
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	15143		
	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	15144		
	Industri Minyak Atsiri	24294		
	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	15313		
	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	15314		
	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji- bijian selain Kopi dan Kakao	15315		
	Industri Kopra	15318		
95	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih:		Maksimal 95%	Pertanian

Perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis lainnya	01113		
	Perkebunan Tembakau	01114		
	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah lainnya	01115		
	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01116		
	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01117		
	Perkebunan Tanaman Minyak Asiri	01118		
	Perkebunan Tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	01119		
	Perkebunan Kelapa	01133		
	Perkebunan Kepala Sawit	01134		
	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	01135		
	Perkebunan Jambu Mete	01136		
	Perkebunan Lada	01137		
	Perkebunan Cengkeh	01138		
	Perkebunan Tanaman Rempah lainnya	01139		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
96	Jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja).	74910	Maksimal 49%	Tenaga Kerja dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
97	Pelatihan Kerja (untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja).	80929	Maksimal 49%	Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

d. Lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

d. Lokasi Tertentu

NO	BIDANG USAHA	KBLI	LOKASI	SEKTOR
1	Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor)	01221	tidak bertentangan dengan dengan PERDA	Pertanian

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

e. Perizinan Khusus

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
1	Pertambangan Mineral Radio Aktif	12000	BATAN	Mendapat rekomendasi dari BATAN dan bekerjasama dengan BATAN
2	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M ³ /Th	20101	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
				dan/atau perubahannya
3	Industri Veneer	20214	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya

4 Industri ...

4	Industri Kayu Lapis	20211	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
5	Industri Laminated Veneer Lumber (LVL)	00000	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
6	Industri Serpih Kayu (wood chip)	20299	Kehutanan	Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
				PP No. 6/2007 dan/atau perubahannya
7	Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	02049	Kehutanan	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan
8	Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEL.	05011	Kelautan dan Perikanan	Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2006 dan/atau perubahannya
9	Unit Pelayanan Pos: - Surat - Warkat Pos - Kartu Pos	64120	Komunikasi dan Informatika	Hanya monopoli untuk BUMN yang lingkup usahanya di bidang pos yaitu PT. POS Indonesia

10	Produsen Narkotika (Industri farmasi)	24231	Kesehatan	10 Produsen ... Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
----	---------------------------------------	-------	-----------	---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
11	Pedagang Besar farmasi Narkotika	51900	Kesehatan	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan
12	Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan	63323	Perhubungan	Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah
13	Penyediaan dan perusahaan pelabuhan penyeberangan	63322	Perhubungan	Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah
14	Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti seperti, perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram	22140	Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL)/ Badan Intelijen Negara (BIN)	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian
15	Industri Percetakan Uang	22140	BOTASUPAL/BIN	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN (Percetakan uang RI (rupiah) hanya oleh Perum Peruri) 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia
16	Industri Kertas Berharga	21013	BOTASUPAL/BIN	1)Wajib mendapat izin operasional dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
				BOTASUPAL/BIN 2)Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian
17	Industri Tinta Khusus	24293	BOTASUPAL/BIN	1)Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN

				2) Wajib ... 2)Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian
18	Industri Bubur Kertas Pulp) dari kayu)	21011	Perindustrian	Bahan baku berasal dari chip impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
19	Industri Rokok: Industri Rokok Kretek	 16002	Perindustrian	1) Rekomendasi dari Departemen Perindustrian bahwa badan usaha tersebut merupakan pengembangan dari industri yang telah ada, atau merupakan industri rokok skala kecil yang telah dibina, atau 2) Wajib Bermitra dengan industri rokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR	KETERANGAN
	Industri Rokok Putih	16003		skala kecil/menengah dan koperasi
	Industri Rokok lainnya	16004		
20	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian	01119	Pertanian	Rekomendasi dari Menteri Pertanian berdasarkan penelitian komisi nasional
21	Industri Peleburan Timah Hitam	27201	Perindustrian	Rekomendasi dari KLH mengenai proses produksi dan pengolahan limbah
22	Pengangkutan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	00000	Kelautan dan Perikanan	Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkutan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

f. Modal ...

f. Modal Dalam Negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pembuatan Film	92112	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pembuatan sarana promosi film (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)	74300	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jasa Teknik film: - Studio pengambilan gambar - Sarana pembuatan film - Sarana penyuntingan, pengisian suara, pemberian teks, penggandaan film, dsb.	71290	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Distribusi Film (ekspor, impor dan pengedaran)	92112	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Penayangan: bioskop/gedung teater film	92120	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Studio Rekaman (Cassette, VCD, DVD, dll)	22130	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA)	02020	Kehutanan
8	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan	02059	Kehutanan
9	Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02039	Kehutanan
10	Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan	05011	Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	laut lepas		
11	Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	05011	Kelautan dan Perikanan

12 Penggalian ...			
12	Penggalian Pasir Laut	14105	Kelautan dan Perikanan
13	Perdagangan Besar Farmasi	51900	Kesehatan
14	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi	51900	Kesehatan
15	Usaha Industri Obat Tradisional	24234	Kesehatan
16	Clinic General Medical Services/Rumah Sakit Umum/Klinik Pengobatan Umum	85114	Kesehatan
17	Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Ambulance Services)	85193	Kesehatan
18	Jasa Rumah Sakit lainnya (Residential Health Services)	85119	Kesehatan
19	Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan: Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Spesialis Praktek Dokter Gigi Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	85121 85122 85123 85191	Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	85192	
20	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	85119	Kesehatan
21	Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan	73120	Kesehatan
22	Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Pelayanan Pest Control/Fumigasi)	85193	Kesehatan
23	Pengolahan Obat Tradisional	24234	Kesehatan
24	Rumah Bersalin Swasta	85113	Kesehatan
25	Apotik (Praktek Profesi Apoteker)	52312	Kesehatan
26	Toko Obat/ Apotik Rakyat	52313	Kesehatan
27	Dana Pensiun	66020	Keuangan
28	BPR Konvensional	65191	Bank Indonesia

29 BPR ...

29	BPR Syariah	65192	Bank Indonesia
30	Pedagang Valuta Asing	67191	Bank Indonesia
31	+)Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	92132	Komunikasi dan Informatika
32	+)Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	92132	Komunikasi dan Informatika
33	Perusahaan Pers	22120	Komunikasi dan Informatika
34	Jasa bisnis/jasa konsultasi kontruksi golongan Besar, Menegah, dan Kecil: Jasa Konsultasi Rekayasa	74210	Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Jasa Rekayasa Desain untuk Proses Industri dan Produksi	74210	Pekerjaan Umum
	Jasa Rekayasa Desain lainnya	74210	
35	Perdagangan Eceran:		Perdagangan
	Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2	52111	
	Departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2	52191	
	Minimarket (dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2)	52111	
	Community Store	00000	
	Convenience Store	00000	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Padi dan Palawija	52511	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Buah-buahan	52512	

			Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Sayur-sayuran	52513	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Peternakan	52514	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan	52515	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Eceran Kaki Lima Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian lainnya	52516	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman hasil Industri Pengolahan:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Beras	52521	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya	52522	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan sejenisnya	52523	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	52524	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Daging Olahan dan Biota Air Olahan	52525	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Rokok dan Tembakau	52527	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	52528	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl	52529	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
Perdagangan ...			
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium :		Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia	52531	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Farmasi	52532	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Jamu	52533	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kosmetik	52534	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pupuk dan Pemberantas Hama	52535	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minyak Atsiri	52536	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium Ytdl	52539	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	52541	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi	52542	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki lainnya	52543	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pelengkap Pakaian dan Benang	52544	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kacamata	52545	

Perdagangan ...

	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Perhiasan	52546	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Jam	52547	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya	52548	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Keperluan Pribadi lainnya	52549	
	Perdagangan Eceran kaki lima perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Elektronik	52551	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat dan Perlengkapan Listrik	52552	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	52553	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	52554	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan	52555	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu atau Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan	52556	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-Alat Kebersihan	52557	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga lainnya	52559	

			Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran kaki lima bahan bakar dan pelumas :		Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar Minyak, Gas dan Minyak Pelumas	52561	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar lainnya	52569	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran kaki lima kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Karton, dan Barang dari Kertas	52571	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Tulis Menulis dan Gambar	52572	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (Software)	52573	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-alat Olahraga dan Alat Musik	52574	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	52575	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mesin Kantor	52576	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Campuran Kertas, Karton, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan lainnya	52577	

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran kaki lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan:		Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Kerajinan	52581	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mainan Anak-anak	52582	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan	52583	
	Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	52591	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang-Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	52592	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Listrik dan Elektronik Bekas	52593	
	Pedagangan Eceran Kaki Lima Barang Antik	52594	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Campuran	52595	
	Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya:		
	Perdagangan Eceran Kaki Lima lainnya	52600	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Keliling: Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	52721	

	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	52722	Perdagangan ... Perdagangan
	Perdagangan Eceran Keliling Bahan- Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	52723	
	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang-Barang Keperluan Pribadi	52724	
	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	52725	
	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	52726	
	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	52727	
	Perdagangan Eceran Keliling Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	52728	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Keliling Barang-barang lainnya	52729	
	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap: Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ tempat tidak Tetap	55250	
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman atau Tembakau:		

	Perdagangan Eceran Barang-barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau selain Di Supermarket / minimarket	52112	Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya bukan Bahan Makanan, Minuman, atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) selain di Toserba (Departement Store).	52192	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian: Perdagangan Eceran Padi dan Palawija.	52211	
	Perdagangan Eceran Buah-buahan	52212	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Sayuran	52213	Perdagangan ... Perdagangan
	Perdagangan Eceran Hasil Petrnakan	52214	
	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	52215	
	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya	52219	
	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan:		
	Perdagangan Eceran Beras	52221	
	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya	52222	
	Perdagangan Eceran Kopi, Gula pasir, atau Gula merah	52223	
	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	52224	
	Perdagangan Eceran Daging dan biota air olahan	52225	
	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau	52227	
	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan	52228	
	Perdagangan Eceran Makanan lainnya	52229	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan alat Laboratorium :		
	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	52311	
	Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik	52312	
	Perdagangan Eceran Barang Farnasi selain di Apotik	52313	
	Perdagangan Eceran Jamu	52314	
	Perdagangan Eceran Kosmetik	52315	
	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama	52316	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan	52317	
	Perdagangan Eceran Minyak Atsiri	52318	
	Perdagangan Eceran lainnya selain yang telah tercakup pada kelompok 52311 s.d 52318	52319	
	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi :		
	Perdagangan Eceran Tekstil	52321	
	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi	52322	
	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki lainnya	52323	

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pakaian dan Benang	52324	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kaca Mata	52325	
	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	52326	
	Perdagangan Eceran Jam	52327	
	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan sejenisnya	52328	
	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi lainnya	52329	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur:		
	Perdagangan Eceran Furnitur	52331	
	Perdagangan Eceran Barang Elektronik	52332	
	Pedagang Eceran Alat dan Perlengkapan Listrik	52333	
	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	52334	
	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	52335	
	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	52336	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik , Batu , Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	52337	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Telekomunikasi	52338	

	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur lainnya	52339	Perdagangan ... Perdagangan
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi:		
	Perdagangan Eceran Barang-barang Logam untuk Bahan Konstruksi	52341	
	Perdagangan Eceran Kaca untuk Bahan Konstruksi	52342	
	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Gelas	52343	
	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	52344	
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	52345	
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	52346	
	Perdagangan Eceran Cat	52347	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Macam-macam Material Bangunan	52348	
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi lainnya	52349	
	Perdagangan Eceran bahan Bakar dan Minyak Pelumas:		
	Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar Di Kios/Toko	52351	
	Perdagangan Eceran Minyak tanah	52352	
	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	52353	
	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas	52354	

	Perdagangan Eceran Bahan Bakar lainnya	52359	Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran Kertas, barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, Komputer:		Perdagangan
	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Kertas Karton	52361	
	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	52362	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (software)	52363	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Olahraga	52364	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Musik	52365	
	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	52366	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Optik dan Perlengkapannya	52367	
	Perdagangan Eceran Komputer dan Mesin Kantor	52368	
	Perdagangan Eceran Mesin-Mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang (Onderdil), termasuk Alat-alat Transportasi:		
	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	52371	
	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	52372	
	Perdagangan Eceran Mesin lainnya dan Perlengkapannya	52373	

	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya	52374	Perdagangan ...
	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	52375	Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan:		
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan sejenisnya	52381	
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan	52382	
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	52383	
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	52384	
	Perdagangan Eceran Mainan Anak-anak	52385	
	Perdagangan Eceran Lukisan	52386	
	Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan lainnya	52389	
	Perdagangan Eceran Komoditi lainnya (bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau):		
	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	52391	
	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	52392	

Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Binatang Peliharaan (Pet Shop)	52393	Perdagangan
	Perdagangan Eceran Bunga Potong / Florist	52394	
	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan	52395	
	Perdagangan Eceran Komoditi lainnya (bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	52399	
	Perdagangan Eceran Barang Bekas:		
	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	52401	
	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	52402	
	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	52403	
	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	52404	
	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	52405	
	Perdagangan Eceran Barang Antik	52406	
	Perdagangan Eceran Barang Bekas lainnya	52409	
	Kedai Makanan dan Minuman:		
	Kedai Makanan dan Minuman	55240	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Penjualan Mobil: Penjualan Eceran Mobil	50102	

	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil: Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	50202	Penjualan... Perdagangan
	Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya Penjualan Eceran Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya	50302	
	Perdagangan Eceran Melalui Media: Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi Kosmetik, dan Alat Laboratorium.	52711	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang-Barang Keperluan Pribadi.	52712	
	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	52713	
	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang-Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 52711 S.d 52713	52714	
	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang lainnya	52719	

36	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak (jasa keagenan/ <i>Commision Agent</i>)	51100	Perdagangan ... Perdagangan
	Perdagangan impor berdasarkan balas jasa(fee) atau kontrak (jasa keagenan/ <i>Commision Agent</i>)	54100	
37	Perdagangan besar minuman keras/ beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor)	51220	Perdagangan
	Perdagangan Eceran minuman keras/ beralkohol	52226	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
	Perdagangan Eceran kaki lima minuman keras/beralkohol	52526	
38	Jasa Survei Perdagangan	00000	Perdagangan
39	Broker properti/real estate atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	70200	Perdagangan
40	Jasa Persewaan Alat Transportasi Darat (<i>Rental Without Operator</i>)	71110	Perdagangan
41	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	71210	Perdagangan
	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	71220	
	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	71230	
	Persewaan Mesin lainnya dan Peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	71290	
42	Jasa Kebersihan Gedung	74930	Perdagangan
43	Jasa Kebersihan Swasta	90002	Perdagangan
44	Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	74990	Perdagangan
45	Jasa Kegiatan lainnya:		Perdagangan
	Jasa Binatu	93010	
	Pangkas Rambut	93021	
	Salon Kecantikan	93022	

	Penjahitan	93091	Penjahitan ...
	Perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	93094	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
46	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	74910	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa cleaning service, satpam, jasa boga dan jasa penunjang lainnya]	74910	Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan:

1. +) Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
2. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
3. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

g. Kepemilikan ...

g. Kepemilikan Modal serta Lokasi

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
1	Hotel (Bintang 1-2): Hotel Bintang Satu Hotel Bintang Dua	55115 55114	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Hotel Melati	55120	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jasa Akomodasi lainnya (Motel dan <i>Lodging Service</i>)	55190	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
4	<i>Homestay</i> / penginapan sejenis	55140	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan	Kebudayaan dan Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
				PERDA	
5	Jasa Boga/Catering	55260	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
6	SPA	93093	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Ketangkasan	92424	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
8	Bar/Café/ <i>Singing Room</i> (Karaoke)	92428	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
9	Restoran: Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa Restoran/Rumah Makan Non Talam	55213 55214	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
10	Usaha Rekreasi dan Hiburan (taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam pemancing, gelanggang permainan, gelanggang bowling, rumah bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap): Billiar Golf Bowling Renang Sepak Bola	92411 92412 92413 92414 92415	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
	Tenis Lapangan Kebugaran/Fitness Sport Centre Kegiatan Olahraga lainnya	92416 92417 92418 92419	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
11	Biro Perjalanan Wisata (<i>Outbound Tour Operator</i>):		Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat	63411			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga	63412			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua	63413			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu	63414			
	Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra	63415			

12 Profesional ...

12	Professional Convention Organizer (PCO)	63440	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
13	Usaha Jasa Impresariat	63450	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata
14	Pengusahaan Obyek Wisata Budaya: Museum Swasta	92322	Maksimal 50%	tidak bertentangan dengan PERDA	Kebudayaan dan Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	LOKASI	SEKTOR
	Peninggalan Sejarah yang dikelola swasta	92324			
15	Hospital Services/ Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta	85113	Maksimal 65%	Medan dan Surabaya	Kesehatan
16	Nursing Services	85191	Maksimal 49%	Medan dan Surabaya	Kesehatan
17	Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	85193	Maksimal 49%	Ibukota Provinsi di Indonesia	Kesehatan

Catatan:

1. Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

h. Perizinan ...

h. Perizinan Khusus dan Kepemilikan Modal

NO	BIDANG USAHA	KBLI	BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING	SEKTOR
1	Pengusahaan Obyek Wisata Alam di luar Kawasan Konservasi	92334	Maksimal 50%	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Industri Bahan Baku untuk Bahan Peledak (Amonium Nitrat)	24114	Maksimal 49%	Pertahanan
3	Industri Bahan Peledak dan Komponennya untuk Keperluan Industri	24292	Maksimal 49%	Pertahanan
4	Usaha Perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit diatas 25Ha dan/atau diatas Kapasitas Tertentu Sesuai Dengan Permentan No. 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya	01134/ 15141	Maksimal 95%	Pertanian

Catatan:

1. Persyaratan Beroperasi/Berproduksi Komersial Dapat Diperoleh Pada Sektor yang Terkait Dengan Bidang Usaha yang Bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

i. Modal ...

i Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

NO	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak dan Peralatan Perang	29270	Pertahanan

Catatan:

1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso